

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul Skripsi

Kode Etik Society of Professional Journalists dalam Kontroversi Film
Balibo

B. Sub Judul Skripsi

Analisis Isi Pemberitaan Film Balibo ditinjau dari Kode Etik Society of
Journalists dalam Portal Berita The Jakarta Post dan Portal Berita ABC News
Periode 1 Juli 2009-31 Desember 2009.

C. Latar Belakang

Salah satu agenda perihal kebijakan luar negeri yang dianggap cukup
penting oleh Istana Negara semenjak lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia pada tahun 1999 adalah normalisasi hubungan antara Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste. Namun,
agaknyanya, agenda tersebut terganggu dengan kemunculan film Balibo.

Balibo merupakan sebuah film thriller politik yang menceritakan invansi
Indonesia ke Timor Timur pada tahun 1975. Lima orang wartawan televisi
Australia yang berbasis di Balibo dikabarkan menghilang begitu saja. Mereka
adalah Greg Shackleton, 27, seorang reporter dari HSV-7; Tony Stewart, 21,
seorang perekam suara dari HSV-7; Gary Cunningham, 27, seorang kameraman

asal New Zealand untuk HSV-7; Brian Peters, 29, seorang kameraman dari TCN-9; dan Malcom Rennie, 29, seorang reporter untuk TCN-9.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Balibo_Five diakses pada tanggal 3 Mei 2010 pukul 08:00 AM)

Roger East, 52, seorang wartawan veteran Australia dari AAP Reuters, diminta oleh Jose Ramos Horta, 26, untuk datang ke Timor Timur untuk melaporkan kebenaran tentang apa yang tengah terjadi di Timor Timur dan membantunya untuk melakukan investigasi akan keberadaan lima orang wartawan tersebut. Awalnya, permintaan Horta tersebut ditolak oleh East, namun dengan berbagai pertimbangan akan suatu kebenaran maka East pun akhirnya menyanggupi permintaan Horta tersebut. Tekad East untuk menemukan kebenaran akan nasib kelima wartawan Australia yang menghilang di tengah invansi Indonesia di Balibo, tak semudah yang ia bayangkan. Berbagai rintangan harus ia hadapi bersama dengan Horta, namun meskipun demikian sebuah tali persahabatan baru antara East sebagai wartawan asing terakhir di Timor Portugis selama invasi Indonesia dengan Horta sebagai calon presiden Timor Timur hari ini, merupakan sebuah potret sejarah yang selama ini tak terungkapkan.

(<http://www.balibo.com/about/synopsis.html> diakses pada tanggal 3 Mei 2010 pukul 07:28 AM)

Film Balibo menuai kontroversi di Indonesia karena tidak sedikit pihak yang mempertanyakan keakuratan film tersebut, di mana Balibo pun dianggap mampu untuk membangkitkan dendam Australia terhadap Indonesia. Kekejaman yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) -sekarang

TNI- selama melaksanakan invasi di Timor Timur diekspos secara terang-terangan dan cukup detil dalam film tersebut. Tangis anak-anak dan perempuan, serta pembantaian terhadap manusia yang dilakukan tanpa rasa ampun menunjukkan betapa kejamnya tentara Indonesia.

Kemunculan film Balibo dalam pergerakan arus informasi dalam lingkungan masyarakat yang senantiasa mengalami perkembangan, baik masyarakat nasional maupun masyarakat internasional, ini pun tentu saja menjadi salah satu santapan media sebab Balibo dianggap sarat akan latar belakang sejarah politik antara Timor Leste, Indonesia dan Australia.

Adanya pemberitaan mengenai kontroversi munculnya film Balibo ini, tampak pada beberapa berita yang muncul di berbagai media nasional maupun internasional yang memberitakan mengenai pelarangan pemutaran film Balibo di Indonesia sebab dianggap memiliki tingkat kesensitifan politik yang sangat tinggi. Larangan tersebut salah satunya ditujukan kepada JFCC (Jakarta Foreign Corresponden Club) oleh Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia pada tanggal 1 Desember 2009 dalam serangkaian acara Jakarta International Film Festival.

Pelarangan tersebut memperlihatkan dengan jelas bagaimana Indonesia dibuat kalang kabut dengan kemunculan film Balibo yang sarat akan politik dan sejarah Timor Leste dengan Indonesia yang cukup menjadi misteri sendiri bagi masyarakat Indonesia sendiri. Reaksi keras Pemerintah Indonesia terhadap kemunculan Balibo menjadi sasaran empuk baik bagi media massa Indonesia maupun media massa Australia sendiri. Atau seperti ungkapan yang cukup dikenal dalam dunia jurnalistik, *bad news is good news*.

The ABC (Australian Broadcasting Cooperation) dan The Jakarta Post merupakan dua contoh bentuk media massa yang memiliki latar belakang dan jenis yang berbeda, namun meskipun demikian keduanya merupakan media massa memiliki pedoman dalam penyampaian berita kepada masyarakat. Atau, dengan kata lain, media massa yang memiliki kebebasan pers pun memiliki etika dalam memberitakan suatu informasi. Sehingga dengan demikian, kebebasan pers merupakan hal yang penting dalam kehidupan pers, namun pers akan lebih bermakna jika disertai tanggung jawab (Ardianto, 2007:2003).

Peneliti menemukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan masalah etika jurnalistik dan objektivitas media pada umumnya. Seperti penelitian yang dilakukan mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Birgitta Bestari Puspita Jati, yang mengkaji objektivitas pemberitaan tentang Pandemi Virus H5N1 (Flu Burung) yang melanda Indonesia dalam Pers Asing, International Herald Tribune, dan Pers Nasional, The Jakarta Post (2008). Dengan menggunakan unit analisis dari kecenderungan objektivitas berita, penelitian tersebut menunjukkan hasil seperti tabel di bawah ini.

Unit Analisis	Kategorisasi	International Herald Tribune	The Jakarta Post
Jenis Fakta	• Fakta sosiologis	41,2 %	25,3 %
	• Fakta psikologis	58,8 %	74,7 %
Kelengkapan unsur 5W + 1 H	• What	100 %	100%
	• Who	100%	100%

	• When • Where • Why • How	100% 100% 100% 88,2 %	100% 100% 98,1 % 94,8 %
Dimensi Berita	• Kesehatan • Politik • Ekonomi • Sosial Budaya • Pertahanan Keamanan	100% 23,5% 5,9% 47,7% 5,9%	99,4% 17,5% 16,2% 18,8% 2,6%
Nilai Berita	• Significance • Human Interest	94,1% 5,9%	90,9% 9,1%
Pernyataan	• Relevan	100%	100%
Narasumber	• Tidak Relevan	0%	0%
Tipe Liputan	• Multi sisi • Dua sisi • Satu sisi	41,2 % 29,4 % 29,4%	31,8% 29,2% 39%
Arah Berita	• Netral • Memberikan gambaran positif terhadap Indonesia • Memberikan gambaran negatif terhadap Indonesia	52,9% 0% 47,1%	72,7% 3,3% 24%

Sumber: skripsi Brigitta Bestari Puspita Jati (2008)

Selain berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Brigitta Bestari Puspita Jati terhadap objektivitas pemberitaan tentang Epidemi Virus H5N1 (Flu Burung), peneliti juga melihat adanya penelitian yang dilakukan oleh Editorial Policies Team yang dimiliki oleh ABC News terhadap imparialitas media massa, yakni ABC News, dalam memberitakan pemilihan umum yang dilakukan di Queensland pada tahun 2009 dan Australian Capital Territory pada tahun 2008 yang kemudian digunakan sebagai laporan kinerja tahunan ABC News dalam *Final Report of Impartiality Election Coverage 2009* (2009).

Kedua penelitian tersebut menjadi inspirasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam kinerja media massa Indonesia dan media massa Australia dalam pemberitaan Balibo yang sarat akan kesensitifan politik.

Kode etik selalu diawali dengan adanya pemahaman terhadap etika. Etika merupakan suatu formasi atas nilai-nilai serta prinsip-prinsip benar dan salah (Masduki, 2004: 47) sehingga masyarakat professional seperti jurnalis, yang dipercaya bertujuan untuk menyajikan kebenaran, memerlukan adanya sejumlah prinsip etis dalam menyajikan kebenaran tersebut, mulai dari faktualitas, akurasi, ketidakberpihakan dan sebagainya.

Etika pers (etika komunikasi massa) merupakan filsafat moral yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban pers dan tentang penilaian pers yang baik dan pers yang buruk. Atau dengan kata lain, etika pers adalah ilmu mengenai peraturan-peraturan yang kegiatan jurnalistik yang menuntut adanya suatu

kesadaran moral dari para pelaku jurnalistik (Ardianto, 2007: 196) sebab kinerja jurnalistik sarat akan tanggung jawab sosial.

Kode etik memiliki arti sebagai himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis. Jadi kode etik berarti kumpulan tertulis tentang suatu etika. Dengan kata lain, istilah etika masih bersifat umum, sedangkan ketika etika sudah diawali dengan kata “kode” maka itu sudah menunjuk kepada suatu etika profesi tertentu (Dewan Pers).

Etika profesi atau kode etik tentang jurnalistik disusun dengan tujuan untuk mengatur kinerja profesi jurnalistik agar tidak menyalahi etika yang ada kepada masyarakat. Kode etik bertujuan mengatur jalannya kerja jurnalistik dengan baik dan sesuai etika.

Terdapat beberapa pedoman atau etika jurnalistik yang bisa dijadikan acuan bagi setiap media untuk memberitakan suatu hal, baik itu skala nasional seperti Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) dan kode etik Aliansi Jurnalistik Independen (AJI). Sementara itu, untuk skala internasional seperti Code of Ethic Society of Profesional Journalist (SPJ) dan American Society of Newspaper Editor (ASNE).

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan kode etik dari Society of Profesional Journalist (SPJ) untuk menjadi pedoman dalam menentukan unit analisis pemberitaan mengenai film Balibo. Alasan peneliti untuk menggunakan Code of Ethic Society of Profesional Journalist dikarenakan (1) peneliti hendak melakukan penelitian terhadap dua media massa yang berbeda jenis yakni media cetak dan media elektronik yang dituangkan ke dalam media online, (2) kedua

media massa berasal dari dua negara yakni Australia dan Indonesia, di mana yang keduanya memiliki sejarah panjang dengan Timor Leste sejak tahun 1942. Sehingga dengan demikian, penelitian dengan Kode Etik Society Profesional of Journalist diharapkan bersifat lebih umum karena dicanangkan untuk kalangan profesional jurnalis secara universal tanpa adanya latar belakang politik atau filosofi negara tertentu dan berlaku baik bagi media elektronik maupun media cetak.

Society of Professional Journalist merupakan organisasi jurnalistik yang didirikan sebagai Sigma Delta Chi pada tahun 1909 di Indianapolis, Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengembangkan dan melindungi kebebasan pers bagi pelaku jurnalistik. Pada tahun 1926, untuk pertama kalinya Sigma Delta Chi mengeluarkan kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Sigma Delta Chi berasal dari media cetak, media elektronik maupun media online. Kode etik yang dikeluarkan oleh Sigma Delta Chi memiliki empat prinsip dasar yakni (1) Seek Truth and Report It, (2) Minimize Harm, (3) Act Independently dan (4) Be Accountable (<http://www.spj.org/ethicscode.asp> diakses pada tanggal 3 Mei 2010 pukul 10:23 WIB). Sigma Delta Chi berganti nama menjadi Society of Professional Journalist pada tahun 1988, sehingga dengan demikian kode etik yang mereka keluarkan dikenal sebagai Society of Professional Journalist Code Ethic.

Berdasarkan prinsip kode etik yang dikeluarkan oleh Society of Professional Journalist inilah, peneliti berasumsi bahwa pemberitaan mengenai kontroversi Film Balibo akan mengalami perbedaan di The Jakarta Post dan ABC News. Kode etik Society of Professional Journalist menyatakan bahwa reporter harus

menghormati martabat, privasi, hak dan kesejahteraan orang di setiap waktu (Vivian, 2008: 619). Sehingga secara tidak langsung, kode etik Society of Professional Journalist memuat bagaimana seorang wartawan harus menjunjung tinggi objektivitas berita dengan bersikap jeli terhadap keakuratan data, bagaimana untuk menjaga privasi narasumber, bagaimana untuk bersikap independen (mandiri) serta bagaimana untuk menyajikan fakta (faktualitas) dalam melakukan pemberitaan terhadap suatu peristiwa. (Rivers et all, 1995: 334)

Peneliti melihat bahwa salah satu isu yang selalu hangat mengenai etika jurnalistik adalah imparialitas media massa terhadap suatu peristiwa yang memiliki kedekatan dengan media massa. Oleh karena itu, peneliti memilih dua buah portal berita berbahasa Inggris yaitu ABC News dan The Jakarta Post sebagai perbandingan pemberitaan dilihat dari sisi etika jurnalistik Society Profesional of Journalist dengan mempertimbangkan beberapa hal, yakni asal negara kedua media massa tersebut, target pembaca yang memiliki cakupan lebih luas ketimbang media massa berbahasa Indonesia serta kedekatan media massa dengan isu berita tersebut sendiri.

The Jakarta Post merupakan harian berbahasa Inggris pertama di Indonesia yang menyajikan berita dari berbagai peristiwa di Indonesia dengan prespektif Indonesia kepada pembaca di seluruh dunia. Didirikan pada pertengahan tahun 1983, The Jakarta Post berawal dari sebuah percakapan antara Menteri Informasi, Ali Moertopo dengan Jusuf Wanandi dari harian Suara Karya, mengenai adanya suatu kemungkinan untuk mempublikasikan harian berbahasa Inggris dengan editorial yang berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan komunitas ekspatriat

yang kian berkembang di Indonesia. Dalam percakapan tersebut pula, keberadaan komunitas ekspatriat di Indonesia dikaitkan dengan adanya kesempatan yang cukup bagus terhadap perekonomian Indonesia bagi masyarakat global, oleh karena itu kemunculan The Jakarta Post dianggap memiliki suatu kemampuan dalam menyampaikan informasi dengan perspektif Indonesia kepada masyarakat global, sehingga dengan demikian The Jakarta Post dapat membantu mengurangi adanya dominasi ketidakberimbangan lalu lintas berita dengan sudut pandang global. (http://www.thejakartapost.com/company_profile/thejakartapost_history diakses pada tanggal 3 Mei 2010 pukul 11: 23 WIB)

The Jakarta Post yang hadir pertama kali dengan 5.474 eksemplar pada tanggal 25 April 1983, mengalami perkembangan yang cukup pesat sebagai harian berbahasa Inggris pertama di Indonesia. Oleh karena itu untuk mengikuti perkembangan jaman sebagai media massa maka The Jakarta Post meresmikan The Jakarta Post versi online di www.thejakartapost.com. Sebagai harian yang memiliki objektivitas untuk menyajikan pandangan masyarakat terhadap negara kepulauan yang sangat luas dengan masyarakat dan pemerintahan sebagai suatu negara besar, The Jakarta Post versi online bukan hanya hadir sebagai bentuk online dari The Jakarta Post versi cetak melainkan hadir dengan menawarkan breaking news secara up to date dengan keakuratan informasi dan kedalaman terhadap analisis berita. (<http://beta.thejakartapost.com/about> diakses pada 3 Mei 2010 pada pukul 12: 34 WIB).

Sedangkan sebagai media pembanding, peneliti memilih ABC News dari The ABC. ABC News merupakan kantor layanan berita yang dimiliki dan

dikembangkan oleh pemerintah Australia sejak tahun 1928. ABC News semula dikelola oleh Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Australia kemudian berpindah tangan ke The ABC (Australian Broadcasting Corporation). The ABC merupakan kantor layanan berita yang dikembangkan oleh pemerintah Australia pada tahun 1932 guna mengelola siaran radio nasional bagi seluruh masyarakat Australia, yang kemudian merambah ke media audio visual pada tahun 1953.

The ABC sebagai media massa yang nasional yang dimiliki oleh pemerintah Australia memutuskan untuk memperluas kinerja mereka ke dalam bentuk media baru sebagai ABC Online dengan alamat www.abc.net.au. ABC Online, pertama kali dikembangkan oleh unit multimedia pada tahun 1995 yang dibarengi dengan pengembangan terhadap kebijakan penerbitan website ABC Online. ABC Online dikembangkan dengan konsep sebagai platform digital yang menyediakan materi siaran radio dan siaran televisi yang dapat diakses kapan saja.

Sebagai platform digital bagi media elektronik, ABC Online mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam delapan tahun sejak pertama kali dikembangkan ABC Online, hal ini ditunjukkan dengan dipublikasikannya lebih dari satu juta halaman materi siaran pada akhir tahun 2003. Bukan hanya itu saja, ABC Online juga memberikan layanan televisi digital secara gratis dengan dibentuknya Fly TV dan ABC Kids sebagai bentuk kerja sama dengan divisi televisi. Sedangkan sebagai bentuk kerja sama dengan divisi radio, ABC Online meluncurkan ABC Podcast untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2004. ABC Podcast rupanya mendapatkan suatu tanggapan positif dari masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan data pada tahun 2006 bahwa lebih ratusan

ribu orang mendownload 50 program podcast setiap minggunya. Hal ini mengakibatkan, ABC News sebagai media massa pertama yang memimpin podcast secara internasional.

Sejak pertama kali dikembangkan, ABC Online telah berpindah tangan sebanyak empat kali. Mulai dari tangan unit multimedia pada tahun 1995 hingga tahun 2000, kemudian The ABC kemudian mengganti nama unit multimedia sebagai divisi New Media pada tahun 2000. Satu tahun kemudian, divisi New Media diganti lagi menjadi divisi New Media and Digital Service pada tahun 2001. Enam tahun dikelola oleh divisi New Media dan Digital Service, pada bulan Februari 2007, The ABC kembali merubah nama divisi New Media and Digital Service sebagai ABC Innovation untuk bertanggung jawab dalam mengelola ABC Online. (<http://www.abc.net.au/corp/pubs/media/sl842869.htm> diakses pada tanggal 4 Mei 2010 pada pukul 08:23 WIB).

Dari pemaparan mengenai ABC News dan The Jakarta Post, peneliti sekali lagi ingin menekankan bahwa sebagai media tradisional (media cetak dan media audio visual) yang menyediakan portal berita sebagai media online, kedua media tersebut bukan hanya hadir sebagai bentuk online dari versi cetak The Jakarta Post maupun versi audio visual ABC News melainkan hadir dengan menawarkan *breaking news* secara *up-to-date* dengan keakuratan informasi dan kedalaman terhadap analisis berita.

Seorang *editor in chief* dari Jakarta Globe, Bhimanto Suwastoyo, mengungkapkan bahwa produk berita online dan produk berita media massa tradisional merupakan dua hal yang berbeda sebab produk berita online

merupakan berita yang diproduksi berdasarkan kecepatan waktu. Atau dengan kata lain, portal berita yang dikeluarkan oleh ABC News dan The Jakarta Post selain merupakan versi online dari jenis media tradisionalnya, kedua portal media tersebut merupakan jenis portal berita yang menciptakan kembali konten berita tambahan secara intensif dan *up-to-date* tanpa mengurangi keakuratan dan kedalaman berita (Santana, 2005: 136).

Dari olahan peneliti terhadap kedua media tersebut, salah satu isi pemberitaan yang ada pada tanggal 2 Desember 2009 mengenai pelarangan film *Balibo* di Indonesia. ABC News sebagai media massa Australia yang diasumsikan berpihak pada Australia, memberitakan hal tersebut dengan judul "*Balibo Film Banned in Indonesia*". Dalam berita yang diproduksi oleh ABC News, berita tersebut menggambarkan pemerintah Indonesia memperlakukan masalah yang terjadi di masa lampau yang disuguhkan ke dalam film *Balibo* yang berujung pada pelarangan pemutaran film *Balibo* pada acara nonton bareng yang dilakukan oleh JFCC (Jakarta Foreign Corresponden Club). Dalam berita yang ditulis oleh Geoff Thompson, ABC News tidak menyajikan kutipan langsung dari pihak pemerintah Indonesia mengapa film *Balibo* dilarang di Indonesia.

Sementara itu, The Jakarta Post sebagai media massa Indonesia yang diasumsikan akan berpihak pada Indonesia, memberitakan berita tersebut dengan judul "*'Balibo' Screening Canceled, Deemed 'Too Risky'*" menggambarkan pelarang pemutaran film *Balibo* dalam acara nonton bareng yang diadakan oleh JFCC dikarenakan film tersebut dianggap akan mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Timor Leste di masa depan. Dalam berita

yang ditulis oleh Bruce Emond tersebut ditegaskan oleh kutipan juru bicara TNI Kapuspen Marsda Sagom Tamboen.

Kedua berita yang dikeluarkan oleh The Jakarta Post dan ABC News mengangkat isu yang sama di mana film Balibo dilarang di Indonesia, namun tampak bagaimana kedua media memilih narasumber untuk memberikan pernyataan yang relevan mengapa film Balibo dilarang di Indonesia.

Dari penjelasan contoh di atas, terlihat bagaimana suatu masalah sering muncul dalam hal etika jurnalistik adalah mengenai ketidakberpihakan media terhadap pemberitaan suatu peristiwa. Ketidakberpihakan merupakan bagian dari kode etik yang dikeluarkan oleh Society of Professional Journalist, selain selain etika mengenai akurasi dan faktualitas. Kode etik yang dikeluarkan oleh Society of Professional Journalist menjelaskan bahwa media harus melaporkan berita secara netral dan berimbang. Contoh di atas, sangat menarik jika peneliti lebih jauh mendalami pemberitaan Film Balibo terkait dengan kontroversi film tersebut di Indonesia pada portal berita The Jakarta Post dan ABC News. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan yang ada di benak peneliti, serta berbagai pemikiran yang muncul mengenai kontroversi film Balibo di Indonesia

D. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan etika jurnalistik dalam pemberitaan Film Balibo terkait dengan kontroversi film tersebut di Indonesia dalam portal berita ABC News dan portal berita The Jakarta Post periode 1 Juli 2009- 31 Desember 2009 ditinjau dari Kode Etik Society Profesional of Journalist?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan etika jurnalistik dalam pemberitaan Film Balibo terkait dengan kontroversi film tersebut di Indonesia dalam portal berita ABC News Australia dan portal berita The Jakarta Post periode 1 Juli 2009- 31 Desember 2009 ditinjau dari Kode Etik Society Profesional of Journalist

F. Kerangka Teori

1. Etika

Etika dan kode etik merupakan dua hal yang berbeda, namun kajian terhadap terminologi kode etik selalu diawali dengan pemahaman terhadap etika. Etika merupakan sebuah studi mengenai formasi atas nilai-nilai moral serta prinsip benar dan salah (Masduki, 2007: 47). Sedangkan kode etik merupakan pernyataan yang mendefinisikan perilaku yang dapat diterima dan yang tidak boleh (Vivian, 2008: 619).

Kedua pernyataan yang membedakan atas etika dan kode etik tersebut pun dikuatkan oleh penjelasan Prof. Dr. Kees Bertens, seorang tokoh etika Indonesia. Dalam bukunya, Bertens mengungkapkan bahwa etika tidak sama dengan kode etik karena etika memiliki pengertian yang sangat umum dan luas, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan sementara kode etik memiliki pengertian terhadap etika secara khusus.

Etika memiliki tiga pengertian yang semuanya memiliki perbedaan dalam menelaahnya. Pertama, etika bisa dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma- norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam

mengatur tingkah lakunya. Atau dengan kata lain, etika merupakan suatu system nilai yang dipakai manusia perorangan dalam taraf sosial. Kedua, etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Atau dengan kata lain, etika di sini merupakan kode etik. Ketiga, etika mempunyai arti sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk. Atau dengan kata lain, etika merupakan filsafat moral (Bertens, 2001:6).

Sebagai filsafat moral, etika yang dipahami sebagai suatu kajian umum dan sistematis akan hal yang menjadi prinsip benar dan salah dalam perilaku manusia, dengan demikian etika dapat diimplementasikan dalam berbagai ranah kehidupan manusia, termasuk komunikasi.

2. Etika Komunikasi

Penerapan etika dalam komunikasi, pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menjamin hak berkomunikasi di ruang publik dan hak akan informasi yang benar. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat sebagai konsumen informasi dengan tuntutan informasi yang benar dan institusi media sebagai produsen informasi melahirkan adanya etika komunikasi. Adanya etika komunikasi dikarenakan adanya suatu keinginan dalam memecahkan dilema antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab media sebagai instansi pelayanan publik, sehingga dengan demikian masyarakat mendapatkan mereka untuk mendapatkan informasi yang benar (Haryatmoko, 2007:49).

Sesungguhnya terdapat tiga pertimbangan mengapa penerapan etika komunikasi semakin mendesak, yakni *pertama* media memiliki kekuasaan dan

efek yang dahsyat terhadap publik sehingga etika komunikasi dapat melindungi publik yang lemah. *Kedua*, etika komunikasi merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. *Ketiga*, mencoba sedapat mungkin dapat menghindari dampak negatif dari logika instrumental¹ (Haryatmoko, 2007:38). Melihat adanya tiga pertimbangan tersebut, maka tampaklah mengapa etika komunikasi sangatlah diperlukan dalam hal berkomunikasi terutama jika melihat alasan ketiga. Tak jarang media menyalahgunakan logika instrumental sebagai bentuk pembenaran.

Kebutuhan masyarakat terhadap suatu informasi untuk memenuhi kebutuhan akan penghargaan dan eksistensi diri sebagai makhluk sosial, menuntut agar media massa memberikan informasi yang benar dan riil tanpa adanya suatu manipulasi terhadap informasi dalam mengkonstruksikan realitas. Adanya kebutuhan masyarakat akan informasi yang benar tersebut pun diungkapkan oleh Jürgen Habermas, seorang filsuf Jerman. Ia mengandaikan bahwa tipe komunikasi yang dibangun menjadi medium saling pemahaman tanpa manipulasi, tanpa pengkondisian, dan tanpa tipuan dengan situasi riil (Haryatmoko 2007:41). Oleh karena itu, media massa sebagai saluran utama dalam menciptakan komunikasi yang efektif dengan informasi yang benar dengan aturan tertentu. Atau dengan kata lain, penerapan etika komunikasi terhadap media massa sangatlah diperlukan.

3. Etika Komunikasi Massa

Penarapan etika komunikasi cenderung berhubungan dengan praktek suatu

¹ Logika instrumental di dalam dunia media terkait dengan determinisme ekonomi dan teknologi.

institusi bertujuan untuk memperoleh suatu kebebasan dalam berekspresi sebagai media massa. Namun, meskipun demikian hal yang kerap kali muncul dan belum terselesaikan oleh media hingga hari ini yang erat hubungannya adalah adanya plagiarisme, misintreprsentasi serta penerimaan *freebies* atau sogokan yang dapat berupa *junkets*². Kemunculan ketiga isu tersebut pun kemudian mengakibatkan munculnya aturan akan suatu praktik yang dapat diterima seperti prudensi atau aplikasi kebijaksanaan dalam situasi praktis yang berkaitan dengan etika.

Etika komunikasi massa (etika pers) dipahami sebagai suatu filsafat moral yang berkenaan dengan kewajiban dan penilaian pers akan pers yang baik dan buruk. Atau dengan kata lain, etika pers adalah ilmu tentang peraturan yang mengatur tingkah laku pers atau apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku pers (Ardianto, 2007: 196). Kemunculan etika pers pada dasarnya mempermasalahkan bagaimana seharusnya pers dilaksanakan agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik, sebab sebagaimana masyarakat profesional jurnalis percaya bahwa tujuan jurnalisme adalah untuk menyajikan suatu kebenaran terhadap masyarakat.

Perlu dipahami bahwa etika pers memiliki dua wilayah yakni etika substansif yang terkait dengan wilayah moral yang dianut oleh jurnalis secara personal dan etika operasional yang terkait panduan teknis-etis akan bagaimana meliput dengan mempertimbangkan keseimbangan antara narasumber, akurasi dan menolak adanya sogokan tertentu (Masduki, 2005: 48). Oleh karena itu, keberadaan etika pers sangatlah diperlukan mengingat pers merupakan suatu hasil

² Perjalanan gratis yang diberikan kepada penulis travel oleh perusahaan tertentu dengan kemungkinan untuk mengharapkan imbalan tertentu merupakan salah satu bentuk hadiah atau sogokan yang dilarang oleh kode etik media. (Vivian, 2008: 640)

kinerja jurnalistik yang selalu berpacu dengan *deadline* dan jumlah berita yang harus dipenuhi pada setiap harinya.

Banyaknya peristiwa yang terjadi setiap harinya mengakibatkan banyaknya berita yang menginginkan untuk mendapat ruang dalam media untuk disiarkan maupun dimuat pada hari yang sama. Keterbatasan ruang dalam media massa tersebutpun akhirnya mengharuskan para redaktur untuk memilih berita tersebut, di mana hal tersebut menuntut adanya penilaian redaksional yang berkualitas tinggi. Kemampuan redaktur yang untuk memilih berita dengan nilai berita tinggi dan daya tarik terhadap masyarakat, menuntut agar para redaktur untuk bersikap netral dan objektif (Rivers, 1994: 208). Tuntutan terhadap faktualitas, ketidakberpihakan dan netralitas terhadap para pekerja media tersebut merupakan salah satu prinsip yang diatur dalam kode etik jurnalistik.

4. Kode Etik

Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa pemahaman terhadap terminologi kode etik selalu diawali dengan pemahaman terhadap etika, maka jika kembali menilik salah satu pengertian etika yang diungkapkan oleh Bertens sebelumnya, etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral merupakan pengertian akan kode etik profesi. Contoh: ketika suatu perkumpulan profesi jurnalistik membuat aturan-aturan serta untuk mengatur kinerja profesinya, maka aturan tersebut akan dikenal sebagai “etika jurnalistik” atau ‘kode etik jurnalistik’. Kode etik tersebut dibuat oleh kalangan profesi itu sendiri, yakni kalangan profesi jurnalis.

Dari pengertian tersebut, kode etik bisa dilihat sebagai produk etika terapan

yang dihasilkan berkat adanya penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah profesi tertentu (Bertens, 2000:281). Dengan adanya kode etik maka kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Ibarat sebuah kompas, kode etik menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

Kode yang memiliki arti sebagai tanda (*sign*) atau secara luas kemudian dapat diartikan sebagai suatu bangunan simbolik. Bangunan simbolik atas suatu profesi (kode etik) harus dibangun dengan secara rasional, konsisten dan bersifat universal sebab kode etik merupakan nilai-nilai dasar yang disepakati secara universal sebagai cita-cita yang didambakan oleh setiap manusia dalam kinerja jurnalisme (Masduki, 2007: 49).

Fungsi kode etik dalam profesi diantaranya harus menjadi hasil *self-regulation* (pengaturan diri) dari profesi. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi yang diterima oleh profesi itu sendiri bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen (Bertens, 2000:282). Dengan dibuat dari, oleh dan untuk kalangan profesi itu sendiri, peneliti melihat bahwa kode etik dapat diterima dan dilakukan dalam praktek profesinya dengan dihayati dan dimaknai secara mendalam mampu mengakibatkan adanya hasil kerja yang lebih baik.

Richard L. Johannsen dalam bukunya yang berjudul Etika Komunikasi (1990) menyebutkan bahwa kode etik memiliki tiga fungsi yang terdiri atas fungsi

kemanfaatan, fungsi argumentatif dan fungsi penggambaran karakter (Masduki, 2005: 48).

Fungsi kemanfaatan meliputi (1) mendidik orang baru untuk mengenali pedoman dan tanggung jawab etis profesinya, (2) mempersempit persoalan etis dalam profesi sehingga orang tidak perlu memperdebatkan masalah etik, (3) membantu anggota profesi untuk memahami profesinya dengan cara yang relevan dan (4) memperkecil intervensi peraturan pemerintah ke dalam persoalan profesi. Fungsi argumentative menjadikan landasan terciptanya debat publik atas kasus-kasus yang berkenaan dengan perilaku etis sebuah profesi. Sedangkan fungsi penggambaran karakter merupakan kode etik sebagai gambaran tentang sosok professional yang ingin dibentuk dan menjadi harapan publik. Ketiga fungsi kode etik tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya keberadaan kode etik profesi memiliki tanggung jawab sosial yang sungguh besar.

Kebebasan pers yang dimiliki oleh media massa terkadang disalahgunakan untuk mengecam eksistensi kebebasan pers oleh instansi media demi kepentingan pihak tertentu seperti pencemaran nama baik maupun penyebaran berita bohong. Untuk mencegah penyalahgunaan terhadap kebebasan pers demi kepentingan kelompok tertentu, maka diperlukan sebuah tatanan atas nilai moral atau etika jurnalistik yang diharapkan mampu untuk menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Adanya kebebasan pers tersebut maka para tokoh media mengungkapkan bahwa masyarakat modern memberikan lima syarat terhadap pers, yakni (1) media harus menyajikan 'pemberitaan' yang benar, komprehensif dan cerdas; (2)

media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik; (3) media harus gambaran khas dari setiap kelompok masyarakat; (4) media harus menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat; (5) media harus membuka akses penuh ke berbagai sumber informasi (Ardianto et al, 2007:202).

Kelima syarat yang diajukan dengan tujuan untuk melindungi konsumen media dari pemberitaan yang tidak akurat, netral dan cerdas tersebutpun diterapkan dalam kode etik Sigma Delta Chi yang dikeluarkan pada tahun 1926, kemudian dikenal sebagai kode etik Society of Professional Journalist sejak tahun 1988. Berikut adalah isi secara lengkap isi kode etik Society of Professional Journalist (<http://www.spj.org/ethicscode.asp> diakses pada tanggal 3 Mei 2010 pukul 10:23 WIB)

- *Seek The Truth and Report It*

Jurnalis diharapkan untuk bersikap adil serta berani dalam mengumpulkan fakta dan data atas suatu peristiwa sehingga jurnalis tidak salah menafsirkan data yang diperolehnya tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi jurnalis untuk menghindari adanya suatu *stereotype* pada kelompok tertentu serta tindakan plagiarisme sebab hal tersebut akan mempengaruhi proses produksi berita yang dilakukan oleh seorang jurnalis.

- *Minimize Harm*

Jurnalis diharapkan untuk memperlakukan narasumber maupun subyek pemberitaan dengan baik sebab hal ini berkaitan erat dengan privasi seseorang. Atau dengan kata lain, dalam melakukan liputan, jurnalis diharapkan untuk menghargai privasi narasumber dan memperlakukan narasumber dengan

manusiawi. Oleh karena itu, sangat penting bagi jurnalis untuk tidak bertindak subyektif terhadap narasumber terutama mereka yang terkait dengan tindakan kriminalitas sebab hal tersebut akan berujung pada pencemaran nama baik narasumber atau subyek.

- *Act Independently*

Jurnalis diharapkan untuk bersikap netral dalam memberitakan suatu peristiwa atau melaporkan suatu informasi tertentu, jangan sampai seorang jurnalis melaporkan suatu berita atas pesanan kelompok tertentu sebab hal tersebut akan berkaitan erat dengan objektivitas seorang jurnalis dalam memandang suatu peristiwa tertentu yang kemudian berujung pada netralitas suatu berita.

- *Be Accountable*

Jurnalis diharapkan untuk mampu dalam mempertanggungjawabkan keakuratan berita yang dilaporkannya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi seorang jurnalis untuk melakukan pengecekan ulang terhadap keakuratan dan relevansi data yang digunakan dalam informasi yang diperolehnya tersebut.

Dari keempat isi kode etik Society of Professional Journalist sesungguhnya dapat dilihat bahwa faktualitas (*factuality*) dan keadilan (*fairness*) merupakan tujuan utama bagi penganut kode etik Society of Professional Journalist. Oleh karena itu, peneliti akan menurunkan keempat isi kode etik Society of Professional Journalist sebagai unit analisis tanpa melewatkan salah satu poin pun yang kemudian akan digunakan untuk melihat bagaimana media massa menerapkan kode etik Society of Professional Journalist memberitakan

kontroversi film Balibo. Berikut pemaparan kedua kode etik tersebut,

- **Faktualitas (*Factuality*)**

Kode etik faktualitas merupakan turunan dari poin (1) *Seek the truth and report it* dan (2) *Be Accountable*, peneliti melihat bahwa kedua poin dari kode etik Society of Professional Journalist tersebut menuntut bahwa suatu berita dibuat berdasarkan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Faktualitas sebuah berita dapat diidentifikasi melalui kelengkapan berita yang menjawab pertanyaan atas 5W+1H, keakuratan informasi serta netralitas berita (Morissan et al, 2010: 65).

Peneliti menurunkan faktualitas ke dalam dua unit analisis yakni kebenaran (*truth*) dan keinformatifan (*informativeness*) sebab peneliti melihat bahwa relevansi data merupakan bagian dari kebenaran suatu berita. Apabila suatu data tidak relevan maka tingkat kebenaran suatu peristiwa pun patut dipertanyakan.

Berikut pejabaran masing-masing unit analisis

1. **Kebenaran (*Truth*)**

Suatu kebenaran dalam informasi merupakan suatu tuntutan dalam kinerja jurnalistik. Untuk menyajikan suatu kebenaran maka dalam produksi suatu berita, seorang jurnalis wajib untuk menyajikan suatu fakta yang akurat. Sehingga dengan demikian tampak bahwa akurasi dan faktualitas merupakan bagian dari formula atas bagaimana kelengkapan, kelayakan dan sumber berita disajikan kepada masyarakat (Margantoro et al, 2006:23).

Peneliti melihat bahwa suatu aktualitas dan faktualitas data yang

menunjukkan kebenaran suatu berita dapat diidentifikasi dari dua hal, yakni (1) kelengkapan berita dan (2) relevansi narasumber. Atau dengan kata lain, peneliti menurunkan unit analisis kebenaran menjadi 2 yakni,

1) Kelengkapan berita

Kelengkapan data atas suatu peristiwa dalam berita, disajikan sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan yang didasari dengan formula 5W+1H (*What, When, Where, Who, Why* dan *How* –apa, bilamana, di mana, siapa, mengapa dan bagaimana--). Dengan adanya jawaban yang didasari dengan formula 5W+1H maka kelengkapan informasi akan terjadinya suatu peristiwa yang dibingkai dalam suatu berita dapat diterima oleh masyarakat dengan jelas.

2) Narasumber

Seseorang dipilih untuk menjadi narasumber sebab mereka dianggap tahu dan paham akan peristiwa yang sedang terjadi atau orang tersebut memiliki kapasitas untuk memberi informasi mengenai suatu peristiwa yang terjadi (Romli, 2008: 88). Oleh karena itu, selain jurnalis harus jeli dalam menentukan narasumber, jurnalis juga perlu jeli dalam memilih pernyataan narasumber akan topik yang diangkat. Hal ini dikarenakan bahwa boleh jadi fakta dikumpulkan boleh jadi akurat dan faktual, namun meskipun demikian tidak semua fakta yang akurat dan faktual merupakan fakta yang relevan terhadap suatu peristiwa (Siregar, 2007: 57).

2. Keinformatifan (*Informativeness*)

Keinformatifan suatu berita merupakan kuantitas data atau fakta yang

ditampilkan dalam suatu berita. Hal ini biasanya dapat diwujudkan dengan berapa banyak informasi yang penting, informasi yang menarik, ada tidaknya data visual apa yang dapat ditunjukkan dalam berita tersebut seperti foto, grafik atau tabel (bagi media cetak), rekaman audio visual (bagi televisi) atau rekaman suara (bagi radio). Oleh karena itu, peneliti melihat terdapat tiga aspek utama untuk mengidentifikasi keinformatifan suatu berita yakni (1) nilai berita, (2) tipe berita dan (3) penyajian fakta. Atau dengan kata lain, peneliti menurunkan unit analisis keinformatifan ke menjadi 3 unit analisis yakni:

1) Nilai Berita

Nilai berita merupakan suatu persyaratan awal dalam penulisan suatu berita sebab suatu nilai berita mempengaruhi seberapa penting atau menarik suatu peristiwa diberitakan tersebut. Terdapat enam nilai berita yakni (1) *significance* (penting), (2) *timeliness* (waktu), (3) *magnitude* (besar), (4) *proximity* (kedekatan), (5) *prominence* (ketenaran) dan (6) *human Interest* (manusiawi). Jika dilihat secara berurutan dari seberapa banyak informasi yang ditunjukkan oleh nilai berita tersebut, baik dari 1 ke 6 (dari *significance* ke *human interest*) atau 6 ke 1 (dari *human interest* ke *significance*). Sesuai dengan urutan dari keenam unsur berita tersebut, semakin banyak informasi yang mengarah pada *significance* maka semakin penting peristiwa tersebut. Sedangkan, semakin banyak informasi yang mengarah pada *human interest* maka semakin menarik informasi tersebut (Siregar, 2007: 30).

Selain suatu berita memiliki nilai berita penting dan menarik, adapun berita yang memiliki kedua nilai berita tersebut yaitu penting menarik. Suatu

berita dikatakan penting menarik apabila berita tersebut keseluruhan nilai berita dari *significance* hingga *human interest*.

2) Tipe Berita

Format berita yang ditulis oleh jurnalis menunjukkan tingkat keinformatifan suatu berita sesuai dengan nilai berita yang mengarah ke penting atau menarik. Oleh karena itu, berita yang ditulis oleh jurnalis dikategorikan berdasarkan nilai penting atau menariknya serta kelengkapan fakta atas suatu peristiwa dapat dikemas menjadi *straight news*, *soft news*, *features news*, *opinion news* dan *in depth report* (Siregar, 2007: 154)

3) Penyajian Fakta

Fakta pendukung berupa data gambar, foto, grafik maupun tabel merupakan hal yang memperkuat faktualitas suatu berita. Oleh karena itu, ada tidaknya suatu data visual pendukung dapat meningkatkan keinformatifan suatu berita.

- Keadilan (*Fairness*)

Kode etik keadilan merupakan turunan dari kode etik poin (1) *Minimize Harm* dan (2) *Act Independently*, peneliti melihat bahwa keadilan mengacu pada sikap ketidakberpihakan serta objektivitas jurnalis maupun media terhadap suatu peristiwa. Keadilan media menuntut para jurnalis untuk menghindari adanya bias dalam pemberitaan, yaitu dengan cara memperlakukan narasumber secara adil dan memberikan kesempatan pada orang lain untuk memberikan informasi yang mereka ketahui. Sehingga dengan demikian, apabila seorang jurnalis

melihat adanya dua fakta yang berlainan maka ia harus menyajikan kedua fakta tersebut secara berimbang dan objektif. Atau dengan kata lain, objektivitas serta imparialitas seorang jurnalis merupakan suatu keharusan dalam memproduksi berita

(http://www.thenewsmanual.net/Manuals%20Volume%203/volume3_57.htm)

diakses pada tanggal 27 Juli 2010 pukul 07.16 WIB)

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan dua poin kode etik dari Society of Professional Journalist (1) *Minimize Harm* dan (2) *Act Independently* yang menuntut jurnalis untuk bertindak objektif dan tidak memihak dalam menulis berita, maka peneliti menurunkan dua unit analisis dari kode keadilan menjadi dua yakni (1) imparialitas (*impartiality*) dan (2) objektivitas (*obyectivity*).

1. Imparsialitas (*Impartiality*)

Imparsialitas merupakan perilaku adil atau tidak memihak kepada pihak-pihak yang menjadi objek berita sehingga seorang jurnalis harus meliput, mengonfirmasikan atau memberikan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan atau konflik untuk berbicara sehingga dengan demikian perlu dilakukan *cover both side* (Romli, 2008: 19). Selain dilakukannya *cover both side*, jurnalis juga diharuskan untuk tidak menafsirkan berita sesuai dengan sudut pandang dia sendiri.

Oleh karena itu, peneliti menurunkan imparialitas ke dalam dua sub unit analisis yakni (1) arah pemberitaan dan (2) tipe liputan berita.

1) Arah pemberitaan

Arah pemberitaan mengacu pada bagaimana jurnalis memilih narasumber dan pernyataan narasumber dalam berita yang ditulisnya. (Morissan, 2010: 66). Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, lebih pada konteks apakah pemberitaan condong menyudutkan pemerintah Indonesia atau menyudutkan pemerintah Australia. Atau justru, netral dan tidak mendukung keduanya.

2) Tipe Liputan

Tipe liputan merupakan bagaimanakah seorang jurnalis mengumpulkan fakta yang ia perlukan dalam menulis berita. Hal ini sangatlah penting sebab melalui strategi pengumpulan data yang dipilih oleh seorang jurnalis, ia dapat meneliti apakah dalam berita yang mempunyai nilai atau unsur konflik, mampu mencakup keseluruhan sisi yang terlibat atau tidak (Romli, 2008: 29).

2. Objektivitas (*Objectivity*)

Objektivitas adalah salah satu syarat dalam jurnalistik untuk tidak memaksakan pandangan pribadi dalam suatu berita. Atau dengan kata lain, seorang jurnalis tidak boleh subyektif dalam memproduksi berita tersebut. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi objektif atau tidaknya suatu berita dapat dilihat dari ada tidaknya evaluasi jurnalis yang berupa opini dalam berita tersebut. Oleh karena itu, peneliti menurunkan unit analisis objektivitas ke dalam satu sub unit analisis yakni evaluasi jurnalis.

1) Evaluasi jurnalis

Evaluasi jurnalis dalam suatu berita terdapat opini jurnalis yang atau

penilaian terhadap suatu peristiwa yang bertujuan untuk memberikan penilaian ataupun penafsiran tertentu. (Morrisan, 2010:66). Evaluasi jurnalis dalam suatu pemberitaan dapat hadir melalui pemilihan kata atau gambar emosial seperti penggunaan kata seandainya, apabila atau jika.

G. Kerangka Konsep

Penelitian ini ingin mengetahui penerapan etika jurnalistik dalam kontroversi dalam pemberitaan film Balibo oleh portal berita The Jakarta Post dan ABC News.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana media menerapkan kode etik Society of Professional Journalist dalam kontroversi pemberitaan film Balibo oleh portal berita The Jakarta Post dan ABC News. Melalui kode etik Society of Professional Journalist yang telah diturunkan ke dalam unit analisis, maka peneliti telah menyusun unit analisis ke dalam beberapa kategori dengan batasan-batasan, antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1: Unit Analisis dan Kategori Penelitian

Kode Etik	Unit Analisis	Sub Unit Analisis	Kategori
	Kebenaran (Truth)	Kelengkapan Berita (5W+1H)	• Ada unsur <i>what</i> • Tidak ada unsur <i>what</i> • Ada unsur <i>who</i> • Tidak ada unsur <i>who</i> • Ada unsur <i>when</i>

Faktualitas (<i>Factuality</i>)	Kebenaran (<i>Truth</i>)	Kelengkapan Berita (5W+1H)	• Tidak ada unsur <i>when</i> • Ada unsur <i>where</i> • Tidak ada unsur <i>where</i> • Ada unsur <i>why</i> • Tidak ada unsur <i>why</i> • Ada unsur <i>how</i> • Tidak ada unsur <i>how</i>
		Narasumber	• Relevan • Tidak Relevan
	Keinformatifan (<i>Informativene</i> <i>ss</i>)	Nilai Berita	• Penting • Menarik • Penting dan Menarik
		Tipe Berita	• <i>Straight News</i> • <i>Soft News</i> • <i>Features News</i> • <i>Opinion News</i> • <i>In Depth Report</i>
		Kelengkapan Penyajian Fakta	• Terdapat foto/ grafik/ tabel • Tidak terdapat foto/ grafik/ tabel
	Impartialitas (<i>Impartiality</i>)	Arah Pemberitaan	• Menyudutkan Indonesia

Keadilan (Fairness)	Impartialitas (Impartiality)	Arah Pemberitaan	• Menyudutkan Australia • Kombinasi menyudutkan Indonesia dan Australia • Netral
		Tipe Liputan	• Satu sisi • Dua sisi • Multi sisi
	Objektivitas (Objectivity)	Evaluasi Jurnalis	• Terdapat Opini Jurnalis • Tidak Terdapat Opini Jurnalis

Sumber: Hasil olahan peneliti

H. Definisi Operasional

Kode etik dan unit analisis di atas merupakan acuan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk melihat penerapan kode etik Society of Professional Journalist dalam pemberitaan mengenai kontroversi film Balibo oleh portal berita The Jakarta Post dan ABC News.

Berikut ini adalah penjabaran masing-masing kode etik, unit analisis dan sub unit analisis beserta dengan contohnya yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

- **Faktualitas (*Factuality*)**

Faktualitas merupakan kode etik yang menunjukkan bahwa suatu pemberitaan harus dibuat berdasarkan pada suatu peristiwa yang benar-benar ada dan bukan rekayasa jurnalis. Faktualitas suatu berita dapat diidentifikasi melalui kebenaran serta tingkat keinformatifan suatu berita.

1. **Kebenaran (*Truth*)**

Kebenaran merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, bukan rekayasa atau fiktif. Untuk mengidentifikasi suatu kebenaran suatu berita maka dapat dilihat dari dua hal, yakni (1) kelengkapan berita dan (2) relevansi narasumber.

- 1) **Kelengkapan berita**

Kelengkapan data atas suatu peristiwa dalam berita, disajikan sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan yang didasari dengan formula 5W+1H (*What, When, Where, Who, Why* dan *How* –apa, bilamana, di mana, siapa, mengapa dan bagaimana--). Dengan adanya jawaban yang didasari dengan formula 5W+1H maka kelengkapan informasi akan terjadinya suatu peristiwa yang dibingkai dalam suatu berita dapat diterima oleh masyarakat dengan jelas.

- *What* merupakan pertanyaan akan peristiwa apa yang terjadi menyatakan terjadinya peristiwa. Fakta-fakta tersebut berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan aktor dalam suatu peristiwa
- *Who* merupakan pertanyaan akan aktor atau setiap orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dalam hal ini, perlu diperhatikan pula lingkup narasumber yang berkompeten dalam peristiwa tersebut. Orang yang diberitakan dapat

diidentifikasi dari nama, umur, pekerjaan dan atribut-atribut lain yang melekat pada dirinya.

- *Why* merupakan pertanyaan akan latar belakang suatu peristiwa yang sebelumnya telah diketahui dari pertanyaan *what*.
- *Where* merupakan pertanyaan akan lokasi terjadinya suatu peristiwa.
- *When* merupakan pernyataan akan waktu serta kemungkinan waktu yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Fakta mengenai *when* meliputi hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik, pagi, siang, sore, petang, malam
- *How* merupakan pernyataan yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu peristiwa

Contoh:

Cilacap-MI: Tabung gas 3 kilogram (kg) kembali meledak. Kali ini terjadi di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (21/7) dini hari. Akibat ledakan tersebut, penghuni rumah bernama Sri Winih, 24, mengalami luka dan dilarikan ke RSUD Cilacap. (Media Indonesia, 21 Juli 2010 dalam berita berjudul Tabung Gas Meledak, Penghuni Rumah Terluka)

Dalam kutipan berita tersebut terdapat empat unsur kelengkapan berita yakni (1) *what*-apa yang terjadi- yang ditunjukkan dengan kalimat 'Tabung gas 3 kilogram (kg) kembali meledak'; (2) *where*-di mana suatu peristiwa terjadi- yang ditunjukkan dengan kalimat 'Kali ini terjadi di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng)', (3) *when*-bilamana peristiwa terjadi- yang ditunjukkan dengan 'Rabu (21/7) dini hari' dan (4) *who*-siapa subyek dalam peristiwa tersebut- yang ditunjukkan oleh kalimat 'penghuni rumah bernama Sri Winih, 24'.

Dengan terjawabnya setidaknya empat unsur kelengkapan yakni *what*, *when*, *where* dan *who* tersebut maka akan tampak peristiwa apa yang terjadi,

terjadi di mana, kapan waktu kejadiannya dan siapa korban atau pelaku (aktor) dalam suatu peristiwa.

2) Narasumber

Narasumber adalah orang atau lembaga yang memiliki informasi tentang suatu masalah atau peristiwa, masalah aktual maupun pendapat pribadinya. Seorang narasumber hendaknya memiliki kredibilitas (apakah ia seorang pakar di bidangnya, orang terkenal atau orang yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi kepada jurnalis), ketajaman dalaman memandang suatu masalah, memiliki banyak data akan topik berkaitan, berani berbicara terus terang, berwawasan luas dan tidak plin-plan (Romli, 2008: 88).

Kriteria narasumber seperti itu sangatlah dibutuhkan sebab boleh jadi fakta yang diberikan akurat dan faktual, namun tidak semua fakta yang akurat dan faktual merupakan fakta yang relevan terhadap suatu peristiwa (Siregar, 2007: 57).

- Narasumber relevan dengan kontroversi Film Balibo
- Narasumber tidak relevan dengan kontroversi Film Balibo

Contoh :

JAKARTA, KOMPAS.com— Ketua Umum Partai Demokrat mengatakan, wacana amandemen UUD 1945 yang memungkinkan masa jabatan Presiden diperpanjang adalah murni pernyataan pribadi anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat adalah seorang konstitusionalis dan taat azas sehingga tidak mungkin tergoda menjabat selama tiga.

"SBY pelaku reformasi. Tidak mungkin SBY tergoda untuk periode yang ketiga. Tidak ada selera untuk mengubah ketentuan konstitusi hanya karena kepentingan memperpanjang masa jabatan presiden," kata Anas kepada Kompas.com, Rabu (18/8/2010).

Sebagai Ketua Umum PD, kata Anas, dia juga berpandangan bahwa dua periode adalah yang terbaik. "Kita harus tradisikan ini dalam demokrasi di Indonesia," katanya.

Anas menambahkan, SBY dalam beberapa kesempatan telah menegaskan bahwa dia hanya akan menjabat dua periode.

"Itu beliau tegaskan berkali-kali pada berbagai kesempatan. SBY tidak pernah terpikir dan berniat untuk menambah periode.

Konsentrasinya adalah bekerja yang terbaik untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah berjalan baik dan berfaedah bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia. SBY tidak berniat menambah periode, tetapi berkonsentrasi untuk menambah prestasi," kata Anas.

"Presiden SBY tidak pernah terpikir dan berniat untuk menambah periode. Konsentrasinya adalah bekerja yang terbaik untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah berjalan baik dan berfaedah bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia." Anas Urbaningrum (Kompas, 18 Agustus dalam berita berjudul Soal Amandemen UUD 1945: Anas: Itu Pandangan Pribadi Ruhut)

Berita berjudul *Soal Amandemen UUD 1945: Anas: Itu Pandangan Pribadi Ruhut* yang dikeluarkan oleh Kompas.com pada tanggal 18 Agustus 2010 tersebut memiliki contoh bagaimana Kompas.com memilih narasumber yang dipilih dalam berita tersebut relevan.

Dalam berita yang membahas seputar usulan Ruhut Sitompul, anggota dewan dari Partai Demokrat, yang mengungkapkan bahwa UUD 1945 diamandem sehingga presiden dapat menjalankan masa jabatannya selama tiga periode, pihak Kompas sebagai media memilih Anas Urbaningrum sebagai narasumber sebab sebagai ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum memiliki informasi yang diperlukan dalam berita *Soal Amandemen UUD 1945: Anas: Itu Pandangan Pribadi Ruhut*.

2. Keinformatifan (*Informativeness*)

Keinformatifan suatu berita merupakan kuantitas data atau fakta yang ditampilkan dalam suatu berita. Hal ini biasanya dapat diwujudkan dengan

berapa banyak informasi yang penting, informasi yang menarik, ada tidaknya data visual apa yang dapat ditunjukkan dalam berita tersebut seperti foto, grafik atau tabel (bagi media cetak), rekaman audio visual (bagi televisi) atau rekaman suara (bagi radio). Keinformatifan suatu berita dapat diidentifikasi dari tiga hal, yakni (1) nilai berita, (2) tipe berita dan (3) penyajian fakta.

1) Nilai Berita

Nilai berita merupakan karakteristik sebuah peristiwa yang layak diberitakan atau dipublikasikan di media massa. Semakin lengkap nilai berita yang terkandung di dalamnya, maka peristiwa tersebut semakin layak untuk diberitakan. Berikut penjabaran nilai berita,

- 
- *Significance* (penting) yaitu peristiwa yang berkemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca
 - *Magnitude* (besar) yaitu peristiwa yang menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak atau kejadian yang berkaitan suatu angka yang besar dan dapat menarik perhatian pembaca
 - *Timeliness* (waktu) yaitu peristiwa yang menyangkut hal-hal yang baru saja terjadi
 - *Proximity* (kedekatan) yaitu peristiwa yang dekat dengan pembaca baik secara emosional maupun geografis
 - *Prominence* (ketenaran) yaitu peristiwa menyangkut hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal oleh pembaca seperti orang, benda atau

tempat

- *Human interest* (manusiawi) yaitu peristiwa yang memberi sentuhan perasaan pembaca

Keenam nilai berita tersebut diurutkan dari atas ke bawah, apakah informasi yang terkandung dalam suatu berita mengacu pada nilai penting atau menarik.

- Penting

Suatu berita memiliki dianggap penting apabila berita tersebut mengandung salah satu atau beberapa nilai berita yang mengarah ke *significance*, *magnitude*, *timeliness* atau *proximity*. Semakin berita tersebut mengandung nilai berita yang mengarah ke *significance* maka semakin penting peristiwa tersebut untuk diketahui masyarakat dan semakin relevan pemberitaan tersebut.

Contoh:

Klaten (Espo)—Sekitar 800 tabung gas elpiji ukuran 3 kg ditemukan dalam kondisi bocor di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) PT Kanama di Desa Karangwuni, Kecamatan Ceper, Klaten. Manager Operasional PT KANAMA, Hendra Gunawan mengatakan sekitar 800 tabung gas elpiji yang bocor itu merupakan jumlah kumulatif sejak tanggal 1 Juni lalu. Menurutnya, jumlah tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang mengalami kerusakan rata-rata mencapai 30 buah per hari. Umumnya, kebocoran tabung gas elpiji itu dikarenakan adanya kerusakan pada bagian valve atau alat yang menghubungkan lubang tabung dengan regulator.

“Pemasangan valve itu biasanya mengendor sehingga mengeluarkan bau gas. Mengendornya pemasangan valve itu dikarenakan perlakuan konsumen sendiri,” tutur Hendra saat ditemui wartawan di sela-sela acara inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Rabu (14/7). Menurutnya, kerusakan pada valve bisa mengakibatkan ledakan jika tabung gas elpiji itu tetap digunakan. Hingga kini, sekitar 800 tabung gas elpiji yang bocor itu masih tersimpan di SPBE PT Kanama, Karangwuni. (Solo Pos, 14 Juli 2010 dalam berita berjudul 800 Tabung Elpiji Bocor)

Dari berita *800 Tabung Elpiji Bocor* yang dikeluarkan oleh Solo Pos pada

tanggal 14 Juli 2010 merupakan artikel yang memiliki nilai berita penting, sebab dalam berita tersebut terdapat unsur *magnitude* yang ditunjukkan dengan jumlah 800 tabung gas elpiji di Klaten dengan jumlah kerusakan rata-rata 30 buah perhari; unsur *timeliness* dengan ditunjukkan kurun waktu satu setengah bulan yang terhitung sejak 1 Juni 2010 dan unsur *proximity* dengan ditunjukkan lokasi kejadian yakni Klaten yang dekat dengan pembaca Solo Pos secara geografis.

Dengan terkandungnya tiga nilai berita *magnitude*, *timeliness* dan *proximity* maka berita berjudul *800 Tabung Gas Elpiji Bocor* merupakan berita penting.

- Menarik

Suatu berita dianggap menarik apabila salah satu atau beberapa nilai berita mengarah ke *human interest* yakni *prominence* dan *human interest*. Semakin kurang penting peristiwa tersebut maka semakin mengarah ke *human interest*.

Contoh :

Kompas.com-Lukisan fresco karya Michelangelo di langit-langit kapel Sistine, Vatikan, diduga menyembunyikan gambar lain. Pada salah satu panel yang menggambarkan Tuhan, Michelangelo diduga melukis gambar otak manusia dengan cara disamarkan.

Dalam laporannya di *journal ilmiah Neurosurgery* Juni 2010, peneliti Ian Suk dan Rafael Tamargo dari Sekolah Kedokteran Johns Hopkins University di Baltimore, Maryland, meyakini Michelangelo melukis otak di dalam gambaran Tuhan, di panel "Pemisahan Terang dari Gelap." Dalam lukisan itu terlihat Tuhan sedang melayang, namun di bagian lehernya hingga dada terdapat gambaran yang serupa dengan otak dan saraf tulang belakang... (Kompas.com, 21 Juni 2010 dalam berita berjudul *Ada Gambar Lain di Lukisan Tuhan*)

Dari cuplikan berita yang diambil dari Kompas.com dengan judul *Ada Gambar Lain di Lukisan Tuhan*, berita tersebut diidentifikasi memiliki nilai

menarik sebab terdapat nilai berita *prominence* yang ditunjukkan dengan pelukis Michelangelo dan Kapel Sistine, Vatikan. Selain itu, berita tersebut juga memiliki nilai *human interest* sebab membahas lukisan Tuhan. Oleh karena itu, dengan adanya dua nilai *prominence* dan *human interest* maka berita berjudul *Ada Gambar Lain di Lukisan Tuhan* merupakan berita yang menarik.

- **Penting Menarik**

Suatu berita disebut sebagai penting menarik apabila seluruh informasi yang memiliki nilai *significance*, *magnitude*, *timeliness* atau *proximity*, *prominence* dan *human interest* terdapat dalam berita tersebut.

Contoh :

Napoli, KOMPAS.com — Tokoh kartun beruang lucu dan menggemaskan, Winnie the Pooh, sangat terkenal. Bahkan "berkat" nama Winnie ini polisi berhasil menangkap seorang buronan Italia asal Napoli. Istri dari seorang anggota mafia, Vittorio Pirozzi, yang buron di Belgia, menggunakan nama *Winnie the Pooh* ketika mendaftarkan nomor telepon selulernya.

Polisi telah tujuh tahun memburu Pirozzi dengan hasil nol besar. Titik cerah muncul ketika polisi menyadari istrinya menggunakan nama Winnie. Jika suaminya menelepon selalu dengan menggunakan nomor kartu yang berbeda. Si Winnie ini selalu memakai nomor yang terdaftar pada jam yang sama. Dengan bekal nama dan pola waktu tersebut, polisi berhasil menelusuri keberadaan Pirozzi.

Polisi juga berhasil memecahkan kode-kode yang digunakan pasangan tersebut saat berkomunikasi. Hal itu membawa polisi ke Brussels, Belgia, dan berhasil menangkap Pirozzi, yang tinggal di apartemen biasa pada hari Rabu (4/8/2010).

Polisi membuntuti "Si Winnie" yang menjenguk suaminya ke Brussels. Pirozzi, yang berusia 58 tahun, merupakan anggota sindikat kejahatan Camorra di Napoli dan salah satu dari 100 orang yang paling dicari di Italia. (Kompas.com, 4 Agustus 2010 dalam berita berjudul Mafia Tertangkap Berkat Winnie The Pooh)

Dari cuplikan berita yang diambil dari Kompas.com berjudul Mafia Tertangkap Berkat Winnie the Pooh berita tersebut diidentifikasi memiliki nilai *prominence* yang ditunjukkan dengan adanya tokoh kartun Winnie The Pooh,

sedangkan nilai *significance* ditunjukkan adanya penangkapan buronan asal Italia yang merupakan sindikat kejahatan Camorra. Selain itu, nilai *magnitude* diidentifikasi melalui adanya pengejaran polisi yang dilakukan selama tujuh tahun dan sang buronan merupakan salah satu dari 100 orang yang paling dicari di Italia. Adanya ketiga nilai tersebut maka berita tersebut penting namun menarik.

2) Tipe Berita

Tipe berita merupakan bagaimana fakta disajikan dalam suatu berita berdasarkan nilai penting atau menariknya serta kelengkapan fakta.

- *Straight News*

Straight news merupakan berita yang isinya menyangkut hal-hal penting yang terkait dengan kehidupan pembaca, pendengar maupun pemerisa yang harus diberitakan sesegar mungkin kemada masyarakat. Aktualitas merupakan unsur penting dalam berita ini (Siregar, 2007: 154).

- *Soft News*

Soft news merupakan berita yang tidak mengutamakan unsur penting dalam pemberitaan melainkan menyajikan sesuatu yang menarik yang ditemukan dalam peristiwa penting. Unsur menarik dalam soft news semata-mata hanya berkaitan dengan sentuhan emosional pembaca saja seperti unik, konyol, tragis atau dramatis (Siregar, 2007: 156).

- *Features News*

Features News merupakan berita mengenai sesuatu atau kejadian yang dapat menyentuh perasaan pembaca atau menambah pengetahuan melalui suatu

penjelasan rinci, lengkap dan mendalam (Siregar, 2007: 156).

- *Opinion News*

Opinion news merupakan berita mengenai pendapat, pernyataan atau gagasan seseorang. Seseorang yang dimaksud di sini adalah cendekiawan, sarjana, ahli atau pejabat, mengenai suatu masalah. (Romli, 2008: 22)

- *In Depth Report*

In depth report merupakan berita yang memiliki struktur serupa dengan *features news* namun yang membedakan adalah *in depth report* lebih memberitakan akan suatu peristiwa secara lengkap, mendalam dan analitis. Cara penulisan ini ditujukan agar pembaca dapat memahami duduk perkara suatu permasalahan (Siregar, 2007: 158)

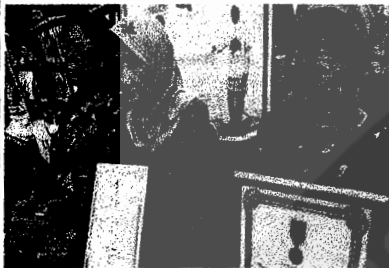
3) Kelengkapan Penyajian Fakta

Kelengkapan penyajian fakta merupakan bagaimana berita menyajikan fakta pendukung yang berupa data gambar, foto, grafik maupun tabel yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa.

- Ada foto/grafik/tabel apabila dalam berita tersebut dilengkapi dengan foto/grafik/tabel yang relevan dengan film Balibo
- Tidak ada foto/grafik/tabel apabila dalam berita tersebut tidak dilengkapi dengan foto/grafik/tabel yang relevan dengan film Balibo

Contoh:

Apa Pun Keputusan Hakim, Kami Siap...



Tiga terdakwa penyerobot rumah dinas (dari kiri ke kanan) Timoria Sr. Mananung, Rusmini dan Soetarti Soekarno saat menggelar aksi blus di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (19/7/2010).

SELASA, 27 JULI 2010 | 10:28 WIB
Oleh: M Clara Wreati

KOMPAS.com — Kelelahan yang luar biasa terlihat jelas di wajah dua perempuan renta itu: Soetarti (78) dan Rusmini (78). Tidak hanya lelah fisik, mereka juga lelah secara mental. Hari ini hakim akan membacakan putusan, yang akan menentukan apakah mereka harus pindah dari rumah mereka atau tidak.

Soetarti dan Rusmini adalah dua dari tiga terdakwa yang sedang berhadapan dengan Perum Pegadaian untuk kasus rumah dinas. Selain mereka, duduk di kursi terdakwa adalah Timoria, dan juga Soegilo (80) yang statusnya masih tersangka.

"Tidak pernah terbayang sebelumnya kami duduk di kursi terdakwa. Padahal, saya merasa saya selalu hidup baik-baik, berusaha tidak

menyakiti orang lain. Namun, sekarang, esat saya tua, saya justru duduk di kursi terdakwa," kata Soetarti ketika ditemui di ruangannya di Cipanas, Jawa Barat, Jakarta Timur, Jumat (23/7/2010).

Dari contoh cuplikan berita dari Kompas.com tersebut tampak bagaimana penyajian fakta dilengkapi dengan foto pendukung yang berkaitan dengan topik yang diangkat.

• Keadilan (*Fairness*)

Keadilan merupakan kode etik yang mengacu pada sikap ketidakberpihakan serta objektivitas jurnalis maupun media dalam menyampaikan suatu berita. Keadilan media dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni imparsialitas dan objektivitas jurnalis dalam melaporkan suatu peristiwa.

1. Imparsialitas

Imparsialitas merupakan ketidakberpihakan jurnalis atau media terhadap menjadi ideologi atau objek berita sehingga seorang jurnalis harus meliput, mengonfirmasikan atau memberikan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan atau konflik untuk berbicara sehingga dengan demikian perlu dilakukan *cover both side* (Romli, 2008: 19). Imparsialitas media dapat

diidentifikasi melalui dua hal, yakni melalui (1) tipe liputan dan (2) arah pemberitaan media.

1) Tipe Liputan

Tipe liputan merupakan bagaimana metode jurnalis dalam mengumpulkan fakta suatu peristiwa. Jurnalis memiliki beberapa metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara serta riset terhadap dokumen. Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan hanya dengan satu metode atau kombinasi antara beberapa metode yang menghadirkan beberapa sumber sehingga dapat mengklarifikasi keakuratan data yang diperoleh.

- Satu Sisi apabila pemberitaan hanya dihasilkan dari pengumpulan data yang diperoleh dari satu pihak atau beberapa pihak yang memiliki pendapat sama.
- Dua sisi apabila pemberitaan yang dihasilkan dari pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa pihak yang memiliki pendapat atau pandangan yang saling berseberangan satu sama lain.
- Multi sisi apabila pemberitaan yang dihasilkan dari pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa pihak dengan beberapa pandangan yang berbeda satu sama lain atau lebih dari dua pernyataan berbeda sehingga pemberitaan lebih cenderung objektif.

Contoh:

TEMPO Interaktif, Jakarta -Agen gas tabung yang ditunjuk oleh PT Pertamina menyatakan penolakannya, jika diminta membeli slang dan regulator berlogo SNI (Standar Nasional Indonesia). Mereka hanya bersedia menjadi tempat penitipan barang saja. "Kalau saya disuruh beli dulu, ya jelas saya berat," kata Setia Permana, marketing PT Trindomas Inti Prima di Jalan Karang Tengah, Jakarta Selatan, pada Tempo siang ini.

Sebab, ujar Setia, pembelian slang dan regulator SNI diramalkan sepi. "Tidak semua orang ambil kan, jadi kalau saya nalangi, kalau tidak laku bagaimana," katanya lagi. Setia menyarakankan PT Pertamina menitipkan saja barang tersebut.

Sementara itu, pihaknya kemarin mengaku menghubungi pihak PT Pertamina perihal selang dan regulator berlogo SNI ini. "Kata mereka belum, wilayah kita belum, hanya wilayah Bekasi," ujar Setia. Pihak Pertamina juga mengkonfirmasi bahwa stok barang untuk wilayah Jakarta Selatan belum ada. (Tempo Interaktif, 11 Juli 2010 dalam berita berjudul Agen Tolak Talangi Pembelian Regulator dan Slang)

Dari berita Agen Tolak Talangi Selang dan Regulator yang diambil dari Tempo Interaktif tanggal 11 Juli 2010 menunjukkan bahwa tipe liputan berita tersebut adalah satu sisi sebab dalam berita tersebut terdapat satu narasumber saja yang mengkonfirmasi perihal selang dan regulator berlogo SNI yakni Setia Permana dari PT. Trindomas Inti Prima sebagai agen, sedangkan narasumber dari Pertamina sendiri tidak mengkonfirmasi hal tersebut

2) Arah Pemberitaan

Arah pemberitaan mengacu bagaimana jurnalis memilih narasumber dan pernyataan narasumber dalam berita yang ditulisnya. Dalam penelitian ini apakah suatu berita menyudutkan Indonesia, menyudutkan Australia, menyudutkan Indonesia dan Australia atau netral.

- Menyudutkan Australia jika di dalam kontroversi pemberitaan film Balibo mencantumkan pernyataan, sikap atau kata-kata tertentu yang berisi dukungan terhadap Indonesia
- Menyudutkan Indonesia jika di dalam kontroversi pemberitaan film Balibo mencantumkan pernyataan, sikap atau kata-kata tertentu yang berisi dukungan terhadap Australia
- Kombinasi menyudutkan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia

jika di dalam kontroversi pemberitaan film Balibo mencantumkan pernyataan, sikap atau kata-kata tertentu yang menyudutkan Australia dan Indonesia

- **Netral** apabila media massa harus memiliki sikap tidak memihak terhadap peristiwa yang mengandung konflik (Morissan et al, 2010: 66), dalam kontroversi pemberitaan film Balibo mencantumkan pernyataan, sikap atau kata-kata tertentu yang berisi dukungan baik terhadap Australia maupun pemerintah Indonesia.

Contoh:

Metrotvnews.com, Depok: Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan program konversi minyak tanah ke gas sejak tiga tahun silam sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi kasus ledakan gas sama sekali tak ada kaitannya dengan program itu. "Tidak ada sama sekali tabung yang meledak karena kebocoran pada selang," kata Ketua PMI ini usai memberi kuliah umum penanggulangan bencana di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok, Kamis (8/7).

Kalla memaparkan, tabung gas bermasalah bukan hanya yang berukuran 3 kg. Tapi juga 12 kg. Jadi, menurut dia, ledakan tak bisa disebut karena kegagalan program konversi gas.

Pria yang akrab disapa JK ini melanjutkan, ledakan juga terjadi karena kelalaian pengguna di mana banyak laporan menyebutkan kelalaian menjadi faktor utama terjadinya ledakan gas. "Tidak ada satupun bukti bahwa tabung itu bocor. Masalahnya cuma selang yang harus diganti saja," jelas JK. Mengutip analisis Kompas, JK mengatakan dalam tiga tahun hanya terjadi 36 kali ledakan gas dari 70 juta tabung gas. Ini berarti, dari setiap dua juta tabung, hanya satu yang meledak. (Metrotv, 8 Juli 2010 dalam berita berjudul Kalla: Ledakan Bukan Kegagalan Konversi Gas)

Dari berita berjudul Kalla: Ledakan Bukan Kegagalan Konversi yang dikeluarkan oleh metrotvnews.com pada tanggal 8 Juli 2010 menunjukkan bahwa berita tersebut mendukung pemerintah dalam hal konversi minyak tanah ke gas elpiji yang dianggap kontroversial. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kutipan dari mantan wakil presiden Jusuf Kalla yang menyatakan bahwa ledakan

tidak bisa disebut sebagai kegagalan program konversi gas melainkan kelalaian pengguna.

2. Objektivitas

Objektivitas adalah salah satu syarat dalam jurnalistik untuk tidak memaksakan pandangan pribadi dalam suatu berita. Atau dengan kata lain, seorang jurnalis tidak boleh subyektif dalam memproduksi berita tersebut. Sehingga dengan demikian, objektivitas maupun subyektivitas jurnalis atau media dapat diidentifikasi melalui ada tidaknya evaluasi jurnalis terhadap isu tertentu.

1)Evaluasi Jurnalis

Evaluasi jurnalis merupakan penyampaian terdapat suatu opini atau penilaian terhadap suatu peristiwa yang bertujuan untuk memberikan penilaian ataupun penafsiran tertentu. Evaluasi jurnalis dalam suatu pemberitaan dapat hadir melalui pemilihan kata atau gambar emosional di dalam berita tersebut. Biasanya dapat ditunjukkan dengan adanya penggunaan kata mungkin, seharusnya atau seandainya.

- Ada evaluasi jurnalis apabila terdapat dalam pemberitaan tersebut menggunakan kata mungkin, seharusnya atau seandainya.
- Tidak ada evaluasi jurnalis apabila terdapat dalam pemberitaan tersebut tidak menggunakan kata mungkin, seharusnya atau seandainya.

Contoh:

Jika selama ini pemerintah begitu serius memerangi para teroris yang bertendensi keyakinan agama, seharusnya hal serupa dilakukan. Sebab, apa pun latar belakangnya, pencabutan nyawa warga negara tidak boleh dibiarkan terus terjadi. (Radar Lampung, 21 Juli 2010 dalam berita berjudul Teror Elpiji Bocor)

Dari cuplikan berita *Teror Elpiji Bocor* yang dikeluarkan oleh Radar Lampung pada tanggal 21 Juli 2010, tampak bahwa evaluasi jurnalis dimunculkan pada berita tersebut. Hal ini tampak pada cuplikan berita yang menggunakan kata 'jika' dan 'apa pun latar belakangnya' yang menunjukkan adanya suatu pengandaian akan upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

I. Metode Penelitian

1. Teknik Penelitian

Demi mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan analisis isi sebagai metodenya. Banyak ahli memberikan pendapat mengenai definisi analisis isi, diantaranya Bernard Berelson, seorang pakar komunikasi dan media massa dari Amerika, yang mendefinisikan analisis isi merupakan teknik penelitian untuk mendeskripsikan isi komunikasi yang nyata secara objektif, sistematis dan kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan dalam isi media atau mengukur perbedaan isi dalam suatu media; Fred N. Kerlinger mendefinisikan bahwa analisis isi merupakan metode studi dan analisis tentang komunikasi dengan cara sistematis, objektif dan kuantitatif dengan tujuan mengukur variable-variabel atau unsur-unsur yang digunakan dalam penelitian analisis isi (Ritonga, 2004: 65).

Hal serupa pun diungkapkan oleh Klaus Krippendorff, ia mendefinisikan analisis isi sebagai suatu teknik membuat inferensi-inferensi (kesimpulan) yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Sah data di sini

dimaksudkan agar penelitian dengan metode analisis isi menghasilkan hasil yang handal, terutama jika peneliti dalam waktu dan keadaan yang berbeda, melakukan penelitian terhadap data yang sama, dengan teknik yang sama pula, maka hasilnya harus sama (Krippendorff, 1993: 18). Sedangkan Ole R. Holsti dan Philip J. Stone mendefinisikan bahwa analisis isi adalah sebagai sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif karakteristi-karakteristik khusus dalam sebuah teks (Krippendorff 1993: 19).

Metode analisis isi digunakan oleh peneliti sebab metode analisis isi mampu menerima bentuk komunikasi simbolik yang tidak terstrukturkan sebagai data serta menganalisis gejala yang tidak teramati (*unobserved*) melalui medium data yang berkaitan dengan gejala tertentu. Atau dengan kata lain, analisis isi dapat digunakan untuk memperoleh gambaran isi pesan komunikasi yang objektif, sistematis dan relevan (Ritonga, 2004: 67). Objek yang biasanya digunakan dalam analisis isi biasanya merupakan objek yang berupa bentuk-bentuk komunikasi yang telah dihasilkan oleh orang lain, seperti berita.

Metode penelitian analisis isi dapat digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media, mengetahui fungsi dan efek media, mengevaluasi media performance dan mengetahui apakah ada bias media. (McQuail, 2000:305).

Oleh karena itu, peneliti memilih metode analisis isi untuk mengetahui bagaimana penerapan kode etik Society of Professional Journalist dalam kontroversi pemberitaan film Balibo. Hal ini disebabkan kode etik Society of

Professional Journalist berisi tentang kode etik faktualitas dan keadilan yang mengacu pada penampilan media. Sehingga dengan demikian, melalui metode analisis isi dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat mengevaluasi penampilan media

2. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu peneliti ingin melihat kode etik Society of Professional Journalist yang diterapkan dalam kontroversi pemberitaan film Balibo dalam portal berita ABC News dan portal berita The Jakarta Post periode 1 Juli 2009 – 31 Desember 2009

Namun dengan dilakukannya penelitian terhadap dua media massa maka penelitian ini bukan hanya deskriptif namun juga komparatif yaitu membandingkan objek penelitian yang satu dengan objek penelitian lainnya. Peneliti ingin mengetahui perbedaan penerapan kode etik Society of Professional Journalist antara ABC News dengan The Jakarta Post.

Dalam penelitian ini, terdapat tahap-tahap dalam penelitian yang harus dilakukan sebelum analisis. Pertama, peneliti menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kode etik Society of Professional Journalist dalam kontroversi pemberitaan film Balibo di portal berita ABC News dan portal berita The Jakarta Post. Kedua, menentukan unit analisis. Unit analisis dalam penelitian analisis isi bisa jadi berdasarkan keinginan peneliti maupun dari sumber teori yang digunakan. Dalam penelitian ini, unit analisisnya berasal dari kutipan isi kode etik Society of

Professional Journalist yaitu faktualitas dan imparialitas.

Dalam penelitian yang ini, peneliti memiliki 49 populasi yang berkaitan dengan isu atau masalah seputar film Balibo yang diterbitkan pada periode 1 Juli 2009-31 Desember 2009 oleh The Jakarta Post dan ABC News. Keseluruhan jumlah populasi tersebut akan ditarik sebagai sampel dengan teknik total sampling sehingga jumlah sampel berita sama dengan jumlah populasi yang ada yakni 49 berita.

Agar penelitian ini mencapai hasil yang objektif dan reliabel maka peneliti perlu melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk memunculkan indeks yang dapat menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Secara sederhana prinsip dari uji reliabilitas adalah semakin tinggi persamaan hasil pengkodean di antara dua pengkode, maka semakin reliabilitas kategori yang telah disusun. Peneliti akan melakukan pretest dengan cara mengkode sampel ke dalam kategorisasi. Kegiatan ini selain dilakukan peneliti, juga dilakukan oleh dua orang lain yang bertindak sebagai pengkode atau intercoder yakni Edward Rees (*Senior Advisor* dari Peace Divided Trust di Timor Leste) dan Dalih Sembiring (Jurnalis dari Jakarta Globe)

Sebelum melakukan penelitian, agar melihat apakah data yang digunakan dalam analisis ini dapat memenuhi harapan, maka dipakai metode uji reliabilitas dengan rumus formula Holsti dengan menggunakan data nominal dalam bentuk presentase pada tingkat persamaan atas kategori yang digunakan, yaitu:

$$\text{Reliability / CR (Coefficient Reliability)} = \frac{2M}{N_1 + N_2}$$

$$N_1 + N_2$$

M = jumlah pernyataan yang disetujui kedua pengkode

$N1/N2$ = jumlah pernyataan yang dikode oleh kedua pengkode

Dalam melakukan uji reliabilitas ini, peneliti menggunakan tabel Cronbach's Alpha³ sebagai patokan untuk melihat nilai batas apakah hasil analisis isi berita yang peneliti lakukan layak uji atau tidak. Berikut tabel Cronbach's Alpha:

Alpha	Tingkat Reliabilitas
0.00 - 0.20	Kurang reliabel
0.20 - 0.40	Agak reliable
0.40 - 0.60	Cukup reliabel
0.60 - 0.80	Reliabel
0.80 - 1	Sangat reliabel

Sumber: (Budi, 2005: 248)

Dari tabel Cronbach's Alpha di atas, maka nilai batas alpha yang digunakan adalah 0,6 sehingga apabila CR atau reliabilitas lebih besar dari nilai batas tersebut, maka CR tersebut dinyatakan layak uji reliabilitas. Namun jika alpha lebih kecil dari nilai batas, maka CR dinyatakan tidak layak uji reliabilitas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan pemecahan masalah dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

³ Cronbach's Alpha merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal pada variable yang telah ditentukan, dalam hal ini unit analisis (<http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/faq/alpha.html> diakses pada tanggal 25 Agustus 2010 pukul 09:29 WIB).

teknik pengumpulan data berupa pengamatan, semantik data (cara untuk menentukan makna berbagai kategori) dan lembar data (Krippendorf, 1993:99).

Berikut teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang berguna bagi penelitian ini.

1. Data intercoder atau *coding sheet*

Merupakan daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator - indikator atau kategorisasi dari variabel penelitian yang harus direspon oleh *intercoder*. Kategorisasi tersebut diturunkan dari unit analisis yang didapatkan dari kode etik Society of Professional Journalist yang berupa faktualitas dan keadilan.

2. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen dokumen tertulis, yaitu berupa 49 berita dari portal berita ABC News Australia dan The Jakarta Post untuk periode 1 Juli-31 Desember 2009.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian. Beberapa buku yang peneliti gunakan dalam studi pustaka antara lain adalah *Jurnalisme Kontemporer*, *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*, *Cover-Up: The Inside Story of the Balibo Five*, *Sepuluh Tahun Tragedi Timtim: Timor Target* serta *Menuju Jurnalisme Beretika*.